



MENTERI NASDEM DI UJUNG TANDUK, PERINDO MASUK?

Sinyal kuat makin retaknya hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh hampir bisa dipastikan akan mempengaruhi posisi para menteri. Bahkan Jokowi tidak membantah kemungkinan reshuffle akan menyasar Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Di sisi lain, santer kabar bila Perindo bakal masuk ke Kabinet Indonesia Maju. Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo tegas membantah meski diakui dirinya dipanggil Jokowi untuk bicara empat mata, Senin (15/5/2023). Jelang Pemilu 2024, peta koalisi sangat dinamis dan bisa berubah sewaktu-waktu. Buktinya, wacana koalisi besar yang sempat didengungkan seusai acara buka puasa Presiden Jokowi dan ketum-ketum parpol pada April lalu perlahan mulai hilang. Tak hanya itu, meski tak secara resmi bubar, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) terbelah usai PPP resmi mendukung Ganjar Pranowo, bakal Capres PDIP. Sementara, Golkar dan PAN hingga kini belum juga menentukan pilihannya. Akan seperti apa peta akhirnya? Kita tunggu saja.

(Baca Hal 11)

TINGKAT KEPUASAN KINERJA Pemerintah Pusat

12.4% Sangat Puas

66.7% Cukup Puas

17.6% Kurang Puas

1.9% Tidak Puas Sama Sekali

1.4% Tidak Tau Tidak Jawab

CHARTA POLITIKA INDONESIA



Parlement (Hal.3)
Catat! Daftar Caleg Sementara Bakal Diumumkan KPU 19 Agustus

PILIHAN TERHADAP SIMULASI 3 NAMA BERDASARKAN PILIHAN PRESIDEN 2019

Kategori	Base Line*	Anies Baswedan 23.5	Ganjar Pranowo 38.5	Prabowo Subianto 31.9	TT/TJ 6.1	Total 100
PILIHAN PRESIDEN 2019						
Joko Widodo - Ma'ruf Amin	55.4	55.4	61	18	7	100
Prabowo Subianto - Sandiaga S, Uno	42.2	42.2	8	53	5	100
TT/TJ	2.5	2.5	43	0	14	100

Ket *N = 1134 ; memilih pada pilpres 2019
Sumber : CHARTA POLITIKAINDONESIA

Luhut Dapat Tugas Khusus Lagi, Pimpin Satgas Percepatan Investasi di IKN



Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan

JAKARTA - Bukan hal mengejutkan lagi bila Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mendapatkan tugas khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terbaru dia ditunjuk sebagai ketua satuan tugas (satgas) untuk mempercepat realisasi investasi di IKN Nusantara.

"Dibentuk juga tim task force khusus yang diketuai Menko Marinves Pak Luhut yang akan mengkoordinir interdept (antar kementerian) dan juga semua lembaga terkait sehingga proses percepatan investasi di IKN dapat berjalan lebih baik dan efisien lagi," kata Kepala Otorita IKN Bambang

Susantono dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/5/2023).

Bambang menambahkan pemerintah juga membentuk tim task force di bidang pertanahan. Hal ini dilakukan agar persoalan tanah yang ditawarkan ke investor dapat jelas sehingga investor bisa merumuskan rencana bisnis yang lebih tajam.

"Sehingga nanti pada waktu pelaku investasi akan berdialog bersama kami, mencari harga terbaik, tentu akan dilandasi data dan informasi yang up-to-date," kata Bambang.

Bambang mengatakan sudah ada 209 surat pernyataan minat (letter of interest) yang telah diterima Otorita IKN per Senin (15/5/2023). Dari 209 surat tersebut, 36 di antaranya sudah masuk tahap penandatanganan perjanjian kerahasiaan (non disclosure agreement/NDA).

Ini menyebut dengan ditanda-

tanganinya NDA, maka pembahasan mengenai investasi akan lebih detail karena akan terjadi pertukaran data antara pemerintah dan investor. Kemudian, investor akan membuat studi kelayakan dan rencana bisnis.

"Ini memang memerlukan waktu. Tapi saya dan Pak Doni (wakil ketua Otorita IKN) diminta untuk mempercepat proses ini agar bisa terealisasi apa yang diinginkan investor di lapangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku," kata Bambang.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Aset dalam Penguasaan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam beleid yang dirilis 10 Mei lalu, Sri Mulyani memberikan beberapa rambu soal pengelolaan aset negara di IKN. Rambu salah satunya terkait pejabat yang berwenang mengelola aset negara di IKN.

Dalam beleid itu, ia mengatur pejabat yang berwenang mengelola aset dan barang milik negara di IKN adalah menteri keuangan. "Menteri

selalu bendahara umum negara adalah pengelola barang," katanya seperti dikutip dari beleid tersebut, Senin (15/5/2023).

Selain pejabat pengelola, Sri Mulyani dalam beleid itu juga mengatur soal bentuk pemanfaatan aset negara di IKN. Ia mengatur pemanfaatan aset negara di IKN bisa dilakukan dalam beberapa bentuk; sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah/ bangun serah guna, kerja sama penyiapan infrastruktur dan kerja sama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur.

Berkaitan dengan kerja sama penyiapan infrastruktur ini, Sri Mulyani menyebut ada beberapa pihak yang bisa terlibat. Pertama, pengusaha atau badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas. Kedua, pengusaha asing. Ketiga, BUMN dan BUMD.

Keempat, anak perusahaan BUMN yang diperlakukan sama dengan BUMN sesuai ketentuan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada badan usaha milik negara dan perseroan terbatas; atau koperasi. (wid,rls/dya)

Warga Puas Layanan Adminduk, Dispendukcapil Kota Malang Raih Predikat Pelayanan Prima

MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) mendapatkan apresiasi tinggi dari masyarakat terkait layanan kepengurusan dokumen dan administrasi kependudukan (adminduk) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Merdeka. Kecepatan, efisiensi, fasilitas yang baik, dan sikap ramah petugas menjadi faktor utama yang memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam memanfaatkan layanan tersebut.

"Ini mengurus KTP yang hilang, tadi saya datang jam 09.00 pagi, kurang lebih jam 9.15 sudah selesai, katanya disuruh nunggu dulu 3 harian. Menurut saya cepet sih, soalnya kalau dulu-dulu kan belum tentu seminggu sudah jadi. Antrenya juga tertib," ujar salah satu warga Sawojajar, Nike (21) saat ditemui Lenteratoday di MPP Merdeka, Senin (15/5/2023).

Selain memberikan pujian atas kecepatan pelayanan dan kepatuhan petugas terhadap jadwal, Nike juga memberikan nilai positif pada fasilitas yang disediakan. Selama ia menunggu di depan loket Dispendukcapil Kota Malang, dia mengaku nyaman. "Fasilitasnya di sini menurut saya juga sudah bagus, tidak ada yang kurang. Sofanya, kebersihannya. Petugasnya juga baik-baik, ramah," imbuhnya.

Hal yang sama juga diungkap oleh Sondjo Indra (72). Warga lansia asal Lowokwaru tersebut mengaku, tengah mengurus pergantian kartu keluarga (KK) lama menjadi KK barcode di

MPP Merdeka melalui Dispendukcapil Kota Malang. Sondjo juga memberikan tanggapan positif mengenai kecepatan dan efisiensi layanan petugas. Ia mengaku mendapatkan nomor antrean dengan cepat dan dipanggil oleh petugas dalam waktu singkat. Meskipun perlu menunggu selama dua hari untuk selesainya KK barcode, Sondjo merasa waktu yang diberikan tersebut sudah cukup baik.

"Saya tadi pagi langsung ke sini, jam setengah 9 kurang, ambil nomor antrean dapat nomor 10. Takloma menunggu, habis itu dipanggil sama petugasnya. Menurut saya sih tidak lama, cepet banget. Cuma memang tidak bisa langsung jadi, ini tadi saya disuruh nunggu 2 hari," ungkapnya.

Tak jauh berbeda dari penuturan 2 warga sebelumnya, Aprilia Putri (18) warga Sawojajar, juga mengungkap kesan positifnya selama 2 kali mengurus administrasi kependudukan di Dispendukcapil MPP Merdeka Kota Malang. "Saya sekarang mengurus KTP yang hilang, sudah ada surat pengantar dari kepolisian. Kalau dulu juga pas buat KTP di sini, mulai dari perekaman foto sampai jadi. Pelayanannya bagus kalau menurut saya, petugasnya juga ramah," terang Aprilia.

Meskipun begitu, Aprilia juga berharap agar proses pelayanan dapat lebih dipercepat untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat. "Dulu (pembuatan KTP) selesainya 3 harian. Kalau sekarang katanya juga 3

hari. Ya harapannya semoga dipercepat, kan siapa tahu ada yang memang sedang perlu untuk dokumennya," tukasnya.

Dengan berbagai respon positif warga Kota Malang yang merasakan sendiri kondisi di lapangan, tak salah bila Dispendukcapil Kota Malang meraih predikat Pelayanan Prima (Level A) tingkat nasional dari Kementerian Pan-RB RI. Hal ini berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2022 pada 20 Desember 2022 lalu.

Kepala Dispendukcapil Kota Malang, Dahliana Lusi Ratnasari, menjelaskan komitmennya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Dikatakannya, mereka akan terus memperhatikan survei kepuasan dan mengambil tindakan untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan Dispendukcapil Kota Malang, guna mempertahankan pencapaian Level A tersebut.

"Untuk mempertahankan Level A itu yang jelas kami akan tetap meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Jadi untuk survei kepuasan masyarakat itu kami perhatikan betul. Kemudian juga kami menata lagi, seperti alur pelayanannya itu ditata lagi. Supaya bagaimana kami bisa membuat pelayanan yang lebih efektif lebih cepat lagi dari yang sudah ada," ujar Lusi.



Salah satu warga asal Lowokwaru, Sondjo Indra (72) saat mengurus pergantian KK lama menjadi KK barcode, di Dispendukcapil Kota Malang, MPP Merdeka, Sabtu (15/5/2023) (Santi/Lenteratoday)

Lusi juga menyampaikan, seiring dengan berjalannya waktu, ia akan memaksimalkan pelayanan kepengurusan administrasi, sehingga dapat memangkas waktu selesainya pengurusan dokumen. "Jadi misalkan ada kepengurusan administrasi itu selesainya 3 hari, nah ini bagaimana agar bisa lebih cepat lagi. Ini alurnya masih kita uji cobakan," imbuhnya.

Lusi menyebutkan selain peningkatan pelayanan di MPP Merdeka, pihaknya juga akan mengoptimalkan pelayanan jemput bola, yang akan mulai merambah ke kantor-kantor kelurahan di Kota Malang, terkhusus dalam pelayanan kepengurusan Identitas Kartu Digital (IKD). (santi/dya)

Catat! Daftar Caleg Sementara Bakal Diumumkan KPU 19 Agustus



(Ilustrasi) KPU rencananya akan gunakan kotak suara berbahan karton atau kotak kardus untuk Pemilu 2024, sama dengan yang digunakan pada Pemilu 2019. (dok.ist)

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menutup masa pendaftaran bacaleg yang dilakukan oleh seluruh partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024. Selanjutnya KPU RI akan mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) pada rentang 19-23 Agustus. Mulai hari ini, Senin (15/5/2023), KPU RI melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan para bakal caleg itu.

"Partai politik peserta pemilu tingkat nasional ada 18 partai dan sampai dengan hari ini hari terakhir pendaftaran bakal calon anggota DPR RI itu 18 partai politik peserta pemilu 2024 sudah hadir ke KPU dan sudah mendaftarkan bakal calon anggota DPR RI," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat.

Hasyim menjelaskan KPU RI selanjutnya akan melakukan verifikasi administrasi mengenai persyaratan para bacaleg yang didaftarkan. Dia mengatakan ada dua kategori yang digunakan dalam tahapan verifikasi administrasi bacaleg.

"Nah untuk besok mulai tanggal 15 kegiatan yang dilakukan KPU adalah penelitian atau verifikasi dokumen persyaratan bakal calon. Itu ada dua kategori yang digunakan untuk penilaian atau penelitian yaitu yang pertama kebenaran dokumen persyaratan dan juga keabsahan dokumen persyaratan," ujar Hasyim.

Hasyim menyebut bagi bacaleg yang dinyatakan belum memenuhi syarat akan diberikan kesempatan memperbaiki pada masa perbaikan. "Nah pada masa verifikasi atau penelitian dokumen administrasi itu yang akan digunakan kategori penilaian itu, apakah dokumennya sudah benar dan sah atau belum. Sekiranya masih ada dokumen yang belum benar dan belum sah nanti ada kesempatan bagi partai politik untuk

melakukan perbaikan pada masa perbaikan," imbuhnya.

Lebih detail, Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik menjelaskan pihaknya akan mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) pada 19-23 Agustus. Secara paralel, lanjut dia, pihaknya juga akan melakukan peninjauan masukan dari masyarakat terhadap para DCS tersebut.

"Nanti pada tanggal 19 Agustus selama 5 hari sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023, KPU akan mengumumkan DCS, daftar calon sementara. Mulai tanggal 19 Agustus sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023, KPU RI juga memberikan kesempatan kepada masyarakat menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap DCS yang KPU umum-kan," ujar Idham dalam kesempatan yang sama.

Tak Tercapainya Keterwakilan Perempuan

Terpisah Pengamat Politik sekaligus Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro Senin (15/5/2023) mengatakan, permasalahan keterbatasan caleg perempuan di daerah merupakan isu lama yg memang membutuhkan solusi secara komprehensif baik dari sisi parpolnya maupun SDM perempuan itu sendiri.

"Pertama, soal ketersediaan perempuan yang bisa direkrut sebagai caleg senantiasa kurang, karena kaderisasi parpol perempuan belum dilakukan secara inovatif dan 'out the box'. Rekrutmen kader dan kaderisasi perempuan politik dilakukan dengan cara-cara biasa saja sehingga parpol dihadapkan pada keterbatasan ketersediaan kader perempuan dalam pileg," katanya.

Penyebab kedua, kata Siti Zuhro, perempuan di daerah yang tertarik ke politik belum sangat banyak. Belum

banyak perempuan yang bertalenta, yang bisa direkrut karena keterbatasan skill dan kompetensi perempuan daerah. "Ikhtiar parpol di daerah untuk mengundang perempuan terjun ke politik belum maksimal," katanya.

Ketiga, kata Siti Zuhro, bagi perempuan bisa jadi mekanisme pileg yang ruwet membuat mereka kurang kompetitif dan terlempar dalam pileg. "Pengalaman tersebut cukup demoralizing bagi perempuan dan membuatnya kurang antusias," kata Siti.

Ditambah lagi minimnya dukungan terhadap perjuangan perempuan. Perlu diakui, ekosistem politik di Indonesia belum betul-betul berpihak kepada perempuan. "Pada saat bersamaan daya dobrak kaum perempuan belum cukup ampuh untuk menghadirkan terobosan-terobosan baru yang memunculkan semangat dan animo baru bagi kaum perempuan," katanya.

Siti Zuhro berharap parpol lebih proaktif melakukan 'head hunter' ke kampus-kampus, ke organisasi-organisasi perempuan, dan meminta kader terbaiknya untuk direkrut. Selain juga tentunya perempuan mengembangkan potensi dirinya sendiri untuk berani terjun ke dunia politik.

Sebelumnya, Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (MPKP) menyoroti kebijakan KPU yang akan melakukan revisi terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 harus dimaknai sebagai pengakuan adanya pelanggaran hukum dalam mengimplementasikan ketentuan Pasal 245 UU Nomor 7 Tahun 2017.

Adapun Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditetapkan oleh pengurus partai politik peserta pemilu tingkat kabupaten/kota memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.

"Peristiwa pelanggaran hak politik perempuan sebagai calon anggota DPR dan DPRD tidak seharusnya terjadi apabila KPU mempunyai komitmen yang tinggi melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai kewajiban hukumnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 huruf b UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan KPU memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara," ujar MPKP dalam keterangan resminya, Rabu (10/5/2023).

Menurut dia, KPU dalam menggunakan kewenangan menerbitkan peraturan juga harus senantiasa mematuhi sumpah jabatan sebagaimana diatur Pasal 36 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi "memenuhi tugas dan kewajiban sebagai anggota KPU sesuai Peraturan Perundang-undangan dan UUD NRI 1945 serta melaksanakan tugas dengan

bersungguh-sungguh demi tegaknya demokrasi dan keadilan".

Tidak hanya itu, sebagai Negara Peserta Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan (the Convention of All Forms of Discrimination against Women/ CEDAW) yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU Nomor 7 Tahun 1984, Indonesia, dalam hal ini DPR dan Pemerintah berkomitmen mendorong keterwakilan perempuan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam parlemen. (wid,rls,ist,kum/dya)

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

- 24-30 APRIL 2023**
Pengumuman Pengajuan Bakal Calon
- 1-14 MEI 2023**
Pengajuan Bakal Calon
- 15 MEI-23 JUNI 2023**
Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon
- 26 JUNI-9 JULI 2023**
Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon
- 10 JULI-6 AGUSTUS 2023**
Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon

DCS PENYUSUNAN

- 6-11 AGUSTUS 2023**
Pencermatan Rancangan DCS
- 12-18 AGUSTUS 2023**
Penyusunan Dan Penetapan DCS
- 19-23 AGUSTUS 2023**
Pengumuman DCS
- 19-28 AGUSTUS 2023**
Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Atas DCS
- 14-20 SEPTEMBER 2023**
Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Atas DCS
- 21-23 SEPTEMBER 2023**
Verifikasi Atas Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/kota Pasca Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Atas DCS

DCT PENETAPAN

- 23 SEPTEMBER-3 OKTOBER 2023**
Pencermatan Rancangan DCT
- 4 OKTOBER-3 NOVEMBER 2023**
Penyusunan Dan Penetapan DCT
- 4 OKTOBER-3 NOVEMBER 2023**
Penyusunan Dan Penetapan DCT

*) berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. (Sumber: jatim.kpu.go.id)



Raperda RTRW Kabupaten Pasuruan Gagal Disahkan



PASURUAN – Rapat paripurna dengan agenda pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di DPRD Kabupaten Pasuruan gagal dilakukan. Dampaknya, pengesahan Raperda tersebut juga gagal, padahal batas akhir dari pembahasan raperda tersebut.

Pembatalan paripurna pengesahan perda RTRW ini disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan, dikutip dari beritajatim.com, Senin (15/5/2023). Terkait dengan hal ini, politikus yang akrab dengan sapaan Dion ini meminta supaya ada solusi. Sebab, Raperda ini tidak hanya ditunggu oleh para investor yang akan mengembangkan bisnisnya di Kabupaten Pasuruan, namun juga ditunggu oleh masyarakat.

"Raperda ini sudah lama berproses di eksekutif maupun legislatif dan juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat luas bukan hanya investor. Jika tidak disahkan harus ada solusinya terkait dampak perubahan RTRW ini, Bupati harus benar – benar meminta jaminan dan kompensasi," jelas Dion, Senin (15/5/2023).

Selain itu, dia juga merekomendasikan kepada Bupati Pasuruan untuk menetapkannya dan mengusulkan kepada menteri agar rencana perubahan tata ruang segera diundang-undang. "Alasannya, raperda ini sudah lama diproses di DPRD. Kedua, perda ini ditunggu masyarakat luas agar ada kepastian hukum, kepastian tata ruang untuk masyarakat, seperti buat rumah, buat gudang, itu kan butuh kepastian. Jadi tidak hanya kepastian investasi saja," tegas Sudiono Fauzan, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan.

Meskipun setuju, Politisi PKB ini pun memberikan catatan tentang dampak akibat perubahan tata ruang

dan meminta Pemda Kabupaten Pasuruan bersurat ke Kementerian terkait untuk jaminan untuk pengendalian bencana di area banjir yang statusnya beralih menjadi wilayah industri, seperti di Kecamatan Beji.

"Misalkan seperti di Beji, maka itu menjadi catatan penting yang harus segera dimintakan kompensasi atau jaminan kepada pemerintah pusat untuk pembiayaan pengendalian banjir di area tersebut, dibiayai APBN," tegasnya dikutip dari jatimnow.com, Senin (15/5/2023).

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Rias Yudikari Drastika menyatakan sebanyak enam fraksi meminta agar dilakukan penundaan rapat paripurna pengesahan Raperda RTRW tersebut. Keenam fraksi tersebut diantaranya Fraksi PDI P, Gerindra, Golkar, NasDem, PPP, dan Fraksi Gabungan PKS, Hanura, Demokrat.

"Kita sepakat untuk ditunda. Di sisi lain kita harus memberi waktu pada masyarakat untuk mendalami revisi Raperda RTRW tersebut," papar Rias usai beberapa waktu lalu dikutip dari radarbrromo.com.

Namun, lanjut Rias, di samping penundaan tersebut, pembahasan Raperda perubahan RTRW harus segera dirampungkan. Karena jika tak kunjung disahkan, maka Raperda itu menjadi kewenangan Kementerian ATR/BPN.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan Eko Suryono membeberkan bahwa dirinya turut mengkritisi Raperda perubahan RTRW. Ia menilai bahwa Raperda RTRW cacat secara moril dan formil karena berpotensi mengganggu keselamatan warga.

"Dulu kita minta dibatasi untuk tidak ada porsi latihan bagi anggota TNI di kawasan warga Kecamatan Lekok. Sekarang malah merembet ke Kecamatan Nguling. Sekali lagi, negara

ini ada untuk rakyat," tandas Eko.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko, mengatakan bahwa Pemkab telah mengetahui hasil dari rapat banmus. Dan dalam rapat tersebut Banmus tidak menjadwalkan paripurna pengesahan perda RTRW.

"Kami menghormati proses yang terjadi itu. Tapi, kami juga menyayangkan sikap yang menyepakati sikap itu. Padahal, prosesnya sudah lama. Sangat disayangkan tidak ada proses paripurna keempat," katanya.

Secara regulasi, memang diatur bahwa ketika tidak ada kesepakatan maka Bupati atau Menteri bisa mengesahkan raperda ini melalui PP No 21 tahun 2021. Sehingga pihaknya kali ini melakukan konsultasi ke kementerian untuk tahapan selanjutnya.

Konsultasi ini dilakukan mulai hari ini, mengingat batas waktu maksimal dua bulan pengesahan sejak keluar pergub. "Nanti kementerian membuat kajian seperti apa, kenapa ini tidak bisa disahkan dan sebagainya itu menunggu hasil konsultasi," tutupnya.

Sekda Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko yang dikonfirmasi sejumlah wartawan mengatakan jika ia sangat menyayangkan sikap tersebut. "Kami menghormati proses yang terjadi itu. Tapi, kami juga menyayangkan sikap yang menyepakati sikap itu. Padahal, prosesnya sudah lama," jelas Yudha Triwidya Sasongko, Senin (15/5/2024).

Memang secara regulasi pada PP No 21 Tahun 2021 dikatakan Yudha jika Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah bupati atau pun menteri bisa mengesahkan Raperda RTRW yang ditolak DPRD Kabupaten Pasuruan. Meskipun begitu, Yudha pun tetap saja sangat menyayangkan sikap yang diambil oleh sejumlah fraksi di DPRD, sebab pembahasan Raperda RTRW yang ditolak dewan ini sudah melalui proses panjang dan pembahasan serta

kajiannya dilakukan lintas sektor.

"Hari ini kami sudah minta teman-teman untuk konsultasi ke Jakarta, untuk tahapan berikutnya. Apakah sesuai dengan PP 21 atau ada perkembangan seperti apa. Nanti kementerian akan membuat kajian seperti apa, kenapa ini tidak bisa disahkan dan sebagainya itu menunggu hasil konsultasi teman-teman," terangnya.

Untuk diketahui, sebelumnya, rencana sidang paripurna yang membahas pengesahan Raperda Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) di Kantor DPRD Kabupaten Pasuruan ditunda, Senin (8/5/2023). Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Andri Wahyudi mengatakan jika penundaan tersebut dilakukan karena banyak unsur yang masih belum terpenuhi, sehingga akan dilakukan penjadwalan ulang.

"Pengesahan RTRW batal karena masih ada unsur yang belum terpenuhi," jelas Andri yang juga menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pasuruan.

Menindak lanjuti penundaan itu, Banmus DPRD pun melakukan rapat untuk penjadwalan ulang. Namun diketahui dalam rapat tersebut tidak memunculkan pembahasan tanggal pelaksanaan sidang paripurna keempat Raperda. (lut/dya)



Raperda ini sudah lama berproses di eksekutif maupun legislatif dan juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat luas bukan hanya investor. Jika tidak disahkan harus ada solusinya terkait dampak perubahan RTRW ini, Bupati harus benar – benar meminta jaminan dan kompensasi,"

SUDIONO FAUZAN

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan



Kejari Surabaya Lakukan 32 Restorative Justice Sepanjang 2023



Penghentian proses hukum melalui RJ kejaksaan negeri (Kejari) Surabaya terus dilakukan. Selama 2023 ini setidaknya sudah ada 32 Restoratif RJ.

SURABAYA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya terus melakukan upaya penghentian kasus pidana berdasarkan keadilan Restorative Justice (RJ). Bahkan sepanjang tahun 2023 ini sudah ada 32 perkara yang dihentikan penuntutannya melalui RJ tersebut.

Kasi Pidum Kejari Surabaya Ali Prakoso mengatakan, yang terbaru ada empat perkara yang dihentikan proses hukumnya melalui RJ. Dia juga menandakan bahwa saat ini ada 11 perkara lagi dalam tahap mediasi. Ali mengaku bersyukur karena para pihak yang berperkara sepakat menyelesaikan perkaranya dengan cara kekeluargaan sehingga diselesaikan secara damai.

“Kita sebagai pihak fasilitator kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan dan tidak meneruskan proses hukumnya,” ujarnya dikutip dari beirtajatim.com, Senin (15/5/2023).

Lebih lanjut Ali mengatakan, dibanding tahun lalu untuk tahun ini perkara yang berhasil diselesaikan melalui RJ naik lebih dari seratus persen. “Tahun lalu 13 perkara, untuk tahun ini bulan Januari sampai Mei ada 32 perkara. Semua tak lepas dari peran aktif para Jaksanya,” ujarnya.

Dijelaskan Ali, pada Jumat (12/5/2023), dilakukan Penyerahan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) terhadap empat perkara yang silakukan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restorative (Restorative Justice) di rumah 'Omah Rembug Adhyaksa' Kecamatan Wiyung Kota Surabaya.

“Empat perkara pidana umum yang telah berhasil dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restorative Restorative Justice

terdiri dari dua perkara pencurian masing-masing atas nama tersangka Riswandi Nasidin dan Ridho Anfal, satu perkara penganiayaan atas nama tersangka Hendriyanto dan satu perkara penipuan atau penggelapan atas nama tersangka Amirul Shidiq,” ujarnya.

Sebelum dilakukan penyerahan SKPP, lanjut Ali, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya selaku fasilitator telah melaksanakan musyawarah atau mediasi di beberapa rumah Restorative Justice (RJ) 'Omah Rembug Adhyaksa' yang ada di Kota Surabaya dengan melibatkan tersangka beserta keluarganya, korban beserta keluarganya, serta tokoh masyarakat.

“Dari hasil musyawarah atau mediasi tersebut, baik korban, tersangka dan adanya dukungan dari tokoh masyarakat. Akhirnya sepakat untuk berdamai dan menyelesaikan diluar persidangan. Keadilan restoratif ini menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban maupun pelaku tindak pidana, yang tidak berorientasi pada pembalasan (punitif) serta sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan ke-wenangan penuntutan dan pem-baharuan sistem peradilan pidana,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan adanya kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kemanfaatan dengan menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, serta keadilan yang hidup dalam masyarakat.

“Diharapkan dengan dihentikan perkara pidana melalui RJ ini, tersangka dapat bertaubat dan dapat menjalani kehidupan bermasyarakat tanpa adanya label atau stigmatisasi sebagai terpidana,” ungkap Ali.

Ali menambahkan, pada bukan April kemarin, ada sembilan perkara yang berhasil dihentikan lewat RJ. Lebih lanjut Ali mengatakan, untuk sembilan perkara yang dihentikan berdasarkan keadilan Restorative Justice ini dilakukan di rumah Restorative Justice (RJ) “Omah Rembug Adhyaksa” Kelurahan Putat Kecamatan Sawahan Kota Surabaya pada 18 April 2023.

“Pada tanggal tersebut telah dilaksanakan penyerahan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya terhadap sembilan perkara pidana umum yang telah berhasil dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restorative (Restorative Justice),” ujar Ali.

Kesembilan perkara tersebut terdiri dari tiga perkara pencurian masing-masing atas nama tersangka Saruji Bin H. Sukri, Muhammad Rhazes Isyraqi Bin Ferdy Kurniawan dan Rohman Bin Mat Sahi. Kemudian empat perkara penganiayaan atas nama tersangka Tri Loko Werdhiningsih Binti Soejadi, Franky Bin Suratman, Simon Efendi dan Rahmatullah Setia Budi Bin Muh Hariadi.

Selanjutnya, dua perkara Penipuan atau Penggelapan atas nama Indri Purniawan Bin Alm Sujito dan Sugiono Bin Kambali.

Sebelum dilakukan penyerahan SKPP ini, lanjut Ali, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya selaku fasilitator telah melaksanakan musyawarah atau mediasi di beberapa

rumah Restorative Justice (RJ) “Omah Rembug Adhyaksa” yang ada di Kota Surabaya dengan melibatkan ter-sangka beserta keluarganya, korban beserta keluarganya, serta tokoh masyarakat.

“Dari hasil musyawarah atau mediasi tersebut, baik korban, tersangka dan adanya dukungan dari tokoh masyarakat akhirnya sepakat untuk berdamai dan menyelesaikan diluar persidangan,” ujar Ali.

“Keadilan restoratif ini menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban maupun pelaku tindak pidana, yang tidak berorientasi pada pembalasan (punitif) serta sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana,” lanjutnya.

Ali menandakan, pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang pe-nuntutan harus mampu mewujudkan adanya kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kemanfaatan dengan menggali nilai-nilai ke-manusiaan, hukum, serta keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Disatu sisi, RJ dipandang sangat penting bagi aparat penegak hukum, namun tak semua perkara bisa diselesaikan lewat program ini. Perkara yang bisa diselesaikan lewat program RJ sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf A dan B peraturan Kepala Kepolisian RI nomor 6 tahun 2019 yang menyebutkan tindak pidana yang diselesaikan bersifat ringan atau delik aduan baik bersifat absolut atau relatif.

Kedua ada keinginan dari pihak-pihak yang berperkara pelaku dan korban untuk berdamai. Kemudian bukan perbuatan yang berulang atau residivis. Dan pihak korban harus mencabut laporan atau pengaduan.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya sendiri dalam bidang Tindak Pidana Umum menyelesaikan sebanyak 13 perkara melalui RJ pada 2022 kemarin. Dengan langkah RJ dan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan lewat RJ tersebut mengantarkan Kejari Surabaya menempati urutan ke dua se-Indonesia dalam proses penyelesaian hukum RJ.

“Soal RJ ini menjadi program unggulan, Kejari Surabaya bidang Pidana Umum berhasil menyelesaikan 13 perkara hal ini menjadikan Kejari Surabaya menempati urutan ke-2 di seluruh Indonesia,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya Danang Suryo Wibowo. (lut/dya)

A photograph of Paetongtarn Shinawatra, a Thai politician, speaking at a podium. She is wearing a black blazer over a red t-shirt with white Thai script. Her hands are raised in a gesture of emphasis. The background is a blurred crowd of people.

PAETONGTARN SHINAWATRA

KANDIDAT PM THAILAND

SALAH satu calon kuat Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, pada Rabu menyatakan akan melanjutkan kampanye setelah melahirkan beberapa hari lalu dan tetap percaya diri akan menang telak dalam pemilu pada 14 Mei.

Calon PM berusia 36 tahun itu unggul dalam banyak survei pemilu baru-baru ini. Dia muncul di hadapan publik untuk pertama kalinya dalam sebulan terakhir untuk memperkenalkan anak keduanya, Prutthasin, yang lahir pada Senin (1/5).

Partainya, Pheu Thai, juga unggul di beberapa survei terkini dan telah memenangi pemilu sejak 2001, termasuk meraih kemenangan telak dua kali.

"Thailand harus berubah dan partai Pheu Thai adalah satu-satunya jawaban," katanya dalam konferensi pers di sebuah rumah sakit di Bangkok, setelah memperkenalkan anaknya yang ia sebut sebagai "anugerah".

"Kita tidak bisa lagi menunggu. Jika Pheu Thai bisa menang telak dan memerintah, kita bisa langsung membuat perubahan," katanya.

Sebagian besar analis memperkirakan Pheu Thai akan gagal meraih kemenangan telak dan perlu membentuk aliansi yang gagal dilakukannya pada pemilu 2019.

Pemilu tersebut menjadi pemilu pertama yang digelar sejak pemerintah yang dipimpin bibinya, Yingluck Shinawatra, dikudeta pada 2014.

Partai oposisi lainnya, Move Forward, dipandang banyak pihak sebagai partai yang paling mungkin menjadi mitra Pheu Thai dan sekarang mencatat lonjakan pemilih dalam survei-survei.

Survei nasional oleh National Institute of Development Admini-

stration yang diikuti 2.500 orang pada Rabu menunjukkan bahwa pemimpin Move Forward, Pita Limjaroenrat, mengungguli Paetongtarn untuk pertama kali dengan perolehan 35,4 persen. Dalam survei tersebut Paetongtarn memperoleh 29,2 persen suara.

Ketika ditanya soal aliansi dengan Move Forward, Paetongtarn mengatakan Pheu Thai akan bergabung dengan partai-partai yang mendukung kebijakannya dan menolak pesaing yang didukung oleh militer.

Keluarga Shinawatra dicintai banyak orang Thailand selama bertahun-tahun karena kebijakan populisnya, tetapi juga dicerca oleh beberapa keluarga dan institusi paling kuat di negara itu.

Ayah Paetongtarn, Thaksin Shinawatra, pernah menjabat sebagai PM selama lima tahun sebelum dikudeta oleh militer pada 2006.

Thaksin dan Yingluck kemudian mengasingkan diri untuk menghindari hukuman penjara karena menyalahgunakan kekuasaan, sebuah tuduhan yang menurut mereka bermotifkan politik.

Thaksin mengulangi janjinya untuk kembali ke Thailand setelah 15 tahun di pengasingan. Paetongtarn pada Rabu menegaskan rencana kepulangan apa pun tidak akan berkaitan dengan politik.

"Ayah ingin kembali untuk merawat cucu-cucunya. Beliau tidak bilang ingin menjadi perdana menteri," katanya.

Menurut jajak pendapat pra-pemilu yang dilakukan terhadap 2.000 peserta oleh National Institute of Development Administration (NIDA), Paetongtarn mendapatkan dukungan suara kuat dari para pemilih.

Paetongtarn Shinawatra bakal

menjadi anggota baru dalam dinasti politik Thailand yang terkenal.

Dengan pencalonan Paetongtarn, diperkirakan akan menjadi salah satu persaingan politik panas dalam pemilu Thailand 2023.

"Kita akan memenangkan pemilihan, juga akan menghadapi kudeta militer. Kita akan bersama-sama mengembalikan demokrasi, mengembalikan kemakmuran bangsa dan rakyat, yang telah hilang selama satu dekade," kata Paetongtarn kepada pendukungnya beberapa waktu lalu.

Profil Paetongtarn

Lahir pada tahun 1986 di ibu kota Bangkok, Paetongtarn menempuh pendidikan di sekolah-sekolah top di Thailand dan Inggris.

Semasa pemerintahan Thaksin Shinawatra, Paetongtarn juga kerap mendampingi sang ayah di berbagai kegiatan resmi pemerintah.

"Dia sangat menonjol dan sering terlihat bersamanya (Thaksin). Paetongtarn punya naluri politik seperti Thaksin dan sebagai putri bungsu, banyak hal diwariskan padanya," kata ahli politik Thailand, Thitinan Pongsudhirak dari Chulalongkorn University.

Sebagai seorang miliarder di bidang telekomunikasi, ayahnya

yakni Thaksin adalah sosok populer di kalangan masyarakat miskin pedesaan.

Saat menang pemilu 2001 lalu, ciri khas bisnis Thaksin yang pro rakyat kecil mengantarkan era kesuksesan ekonomi Thailand.

Salah satunya adalah kebijakan tentang pinjaman dan moratorium utang bagi petani serta harga bahan bakar bersubsidi.

Namun pada 2006 ketika dituduh korupsi, Thaksin digulingkan dari pemerintahan dalam kudeta militer dan memilih mengasingkan diri.

Terlepas dari ketidak-hadiran Thaksin secara fisik, pengaruhnya atas Partai Pheu Thai tetap kuat (berbagai sumber)



VENUSTRAPHOBIA

Fobia Langka Takut Berhadapan Wanita Cantik

VENUSTRAPHOBIA adalah fobia yang muncul ketika seorang berhadapan dengan wanita cantik yang dikagumi.

Kondisi ini menyebabkan kepanikan dan jantung berdetak cepat. Ketahui lebih lanjut tentang penyebab, diagnosis, dan penanganannya.

APA PENYEBABNYA?

Hingga kini penyebab pasti venustraphobia belum dapat diidentifikasi. Namun, beberapa faktor dapat mempengaruhi perkembangan kondisi ini secara signifikan.

Merangkum dari berbagai sumber, berikut beberapa faktor penyebab seseorang menderita venustraphobia, diantaranya:

1. Genetika

Jika seseorang memiliki orang tua atau kakek nenek dengan kondisi kesehatan mental, seperti fobia atau gangguan kecemasan, kemungkinan besar mereka akan mengembangkan venustraphobi.

Dikutip dari Mind Help, faktor lingkungan tertentu atau pengalaman traumatis juga dapat memicu fobia pada seseorang yang secara genetik cenderung mengalaminya.

2. Trauma masa lalu

Melansir Exploring Your Mind, terkadang seseorang mungkin memiliki rasa takut akan kecantikan atau venustraphobia karena pengalaman

masa kecil yang traumatis.

Sebagai contoh, hidup dengan ibu yang lalai, acuh tak acuh, atau kasar juga dapat menyebabkan seseorang menjadi takut terhadap wanita.

Pengidap fobia mungkin juga menghadapi perpisahan yang buruk atau perceraian dengan seorang wanita cantik dan akhirnya mengasosiasikan setiap wanita yang menarik dengan rasa sakit dan penderitaan.

Pada dasarnya, segala jenis peristiwa yang membuat mereka sangat terluka atau terpengaruh secara emosional bisa membuatnya trauma dan memicu venustraphobia. Selain itu, stereotip bahwa wanita cantik itu misalnya matre, murahan, dan manja bisa jadi pemicu seseorang memilik venustraphobia.

3. Memiliki gangguan kecemasan

Seseorang juga dapat mengalami venustraphobia karena sebenarnya sudah menderita gangguan kecemasan seperti OCD atau anxiety disorder. Jadi ketakutan terhadap wanita cantik mungkin hanya perpanjangan dari salah satu gangguan kecemasan mereka yang lain.

Sebagai contoh, orang dengan OCD mungkin terobsesi dengan rasa tidak aman mereka sendiri dengan semua alasan yang tidak masuk akal.

Hal ini kemudian membawa pikiran bahwa wanita cantik adalah orang yang juga perlu diwaspadai.

4. Rendah diri

Umumnya, pria atau wanita dengan harga diri atau harga diri rendah lebih rentan terhadap fobia semacam ini. Melansir dari the beautyholic.com, jika seseorang menderita perasaan rendah diri atau sangat pemalu, mereka mungkin ingin menghindari pergaulan dengan wanita yang memberikan kesan menarik dan kuat. Salah satunya Wanita cantik (Lentera todaycom)



KEUNGGULAN WHATSAPP WEB PLUS

WHATSAPP meluncurkan fitur baru berupa ekstensi di browser Google Chrome yang diklaim memiliki berbagai keunggulan.

WhatsApp Web Plus merupakan terobosan dari versi biasa yang diakses dengan browser internet.

WhatsApp Web Plus merupakan ekstensi di browser Google Chrome yang memiliki beragam fitur baru.

Ekstensi WhatsApp Web Plus diklaim menyediakan berbagai peningkatan layanan dan penambahan fitur untuk keperluan bisnis penggunanya.

Berdasarkan laporan dari Wawplus, WhatsApp Web Plus

meningkatkan privasi pengguna dengan menyembunyikan informasi pribadi dari layar.

Ada pula fitur memutar voice note (pesan suara) tanpa notifikasi kepada pengirimnya, menonaktifkan tanda pesan sudah dibaca, dan menyembunyikan status "mengetik (typing)" serta online.

Yang paling menarik, WhatsApp Web Plus bisa memulihkan pesan teks yang telah dihapus oleh pengirim.

Selain itu, WhatsApp Web Plus juga memakai kata sandi untuk masuk ke aplikasi.

Selain itu WhatsApp Web Plus melakukan beberapa penyesuaian

dengan memberikan tombol suka dan reaksi, memberitahu dan menyorot kontak online.

Lalu menambahkan fitur untuk memulai percakapan dengan non-kontak, menyematkan obrolan tanpa batas, dan mempercepat pemutaran pesan suara.

Untuk keperluan bisnis, WhatsApp Web Plus memberikan fitur broadcast message yang memungkinkan pengguna mengirim pesan berantai ke para pelanggan.

Ada fitur smart replies dan auto reply yang dapat disesuaikan. Pesan dari WhatsApp Web Plus juga bisa dijadwalkan untuk dikirim otomatis.

Kontak dari WhatsApp Web Plus juga bisa tersimpan otomatis ke WhatsApp di smartphone.

WA Web Plus adalah ekstensi untuk browser Google Chrome yang menyediakan lebih banyak fitur untuk WhatsApp Web.

Ekstensi sendiri merupakan program perangkat lunak kecil yang memungkinkan Anda untuk menyesuaikan fungsionalitas web browser sesuai kebutuhan atau preferensi individu.

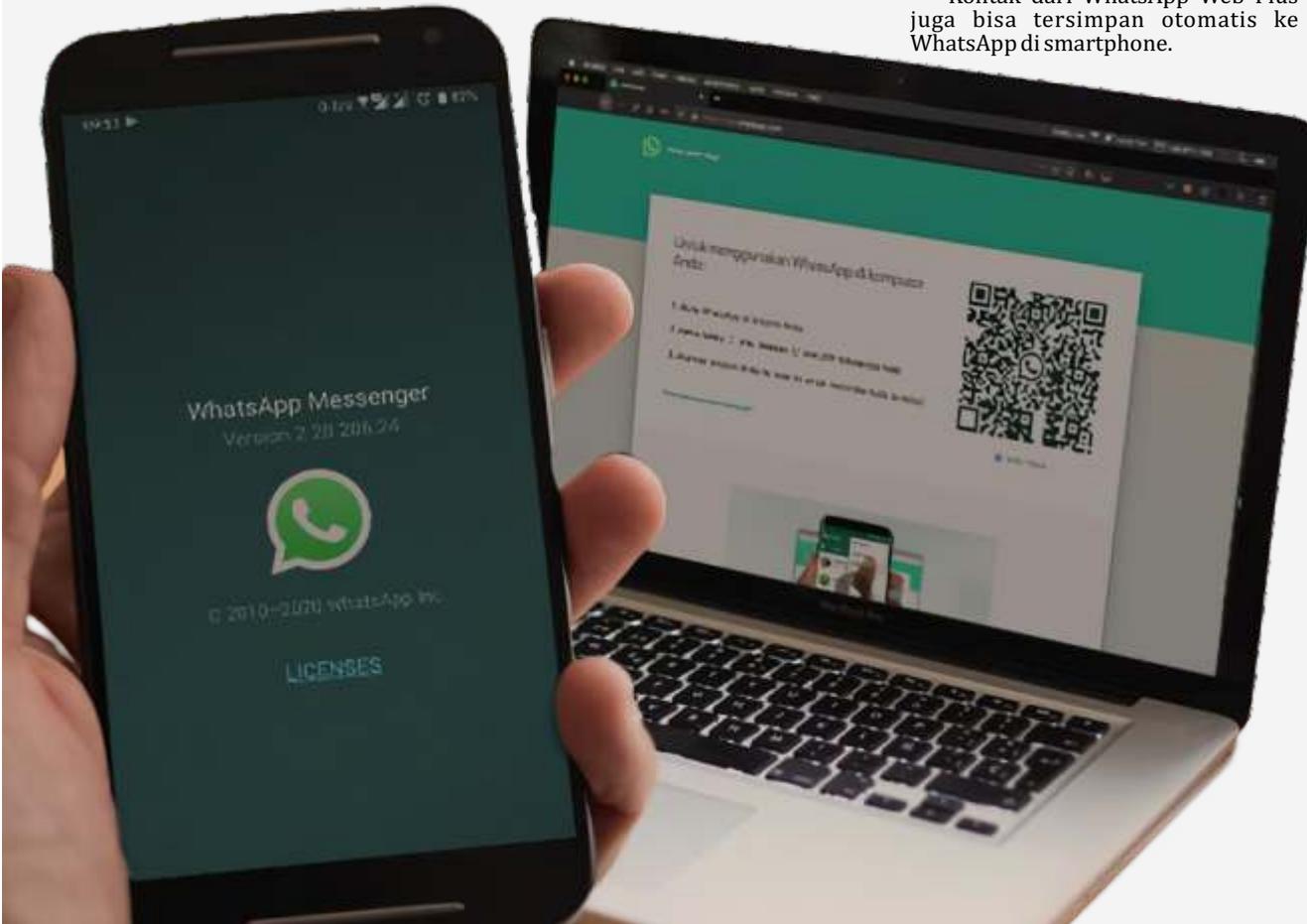
Dilansir laman resminya, WA Web Plus disebut sebagai alat yang memperluas fitur aplikasi Web WhatsApp dengan menyediakan alat pemasaran dan bisnis yang lebih kuat.

Ini akan membantu Anda berkomunikasi dan merespons pelanggan bisnis lebih cepat dan lebih efisien.

Karena WA Web Plus adalah ekstensi untuk Google Chrome, Anda harus menggunakan browser Chrome untuk dapat menggunakannya.

LANGKAH-LANGKAH MEMASANG EKSTENSI KE BROWSER CHROME ANDA :

- Buka browser Google Chrome di PC atau laptop Anda
- Masuk ke laman Google Chrome Extension Store dan cari WA Web Plus, pilih "Wa Web Plus WhatsApp". Atau Anda bisa langsung menuju ke [LINK INI](#).
- Klik tombol "Tambahkan ke Chrome"
- Akan muncul pop up konfirmasi, pilih opsi "Add Extension"
- Setelah ekstensi diinstal, ikon "plus" hijau akan muncul di toolbar browser Chrome Anda, dari situlah Anda dapat membuka WA Web Plus.



EFEK MEMAKAI

TABIR SURYA KADALUWARSA

MASALAH utama yang bisa muncul saat seseorang menggunakan tabir surya kedaluwarsa yakni sunburn atau kondisi iritasi pada kulit akibat paparan sinar ultraviolet (UV) dari matahari yang berlebihan.

Seiring waktu, kondisi ini dapat meningkatkan risiko kanker kulit dan menyebabkan kulit menua sebelum waktunya, menurut Skin Cancer Foundation.

"Setelah tabir surya kedaluwarsa, maka benda ini kehilangan kemanjurannya dan tidak akan memberi perlindungan," kata pakar dermatologi di Westlake Dermatology, Houston, Texas, Neil Farnsworth, MD.

Menurut Cleveland Clinic, dampak ini kemungkinan besar untuk tabir surya mengandung bahan-bahan seperti avobenzon atau octinoxate, yang dapat terurai dengan cepat.

Tabir surya kedaluwarsa juga dapat mengoksidasi atau menampung bakteri yang berpotensi memicu reaksi alergi, ruam atau jerawat.

Menurut Farnsworth, cara termudah mengetahui masa pakai produk yakni melihat tanggal kedaluwarsanya.

Namun, apabila tak menemukannya, maka seseorang bisa mengamati sejumlah tanda produk sudah melewati masa pakai yakni tampak berair, kering atau berpasir, warnanya dan baunya berubah.

Tanggal kedaluwarsa biasanya tiga tahun setelah tabir surya diproduksi

dan ini tercantum pada botol atau tabung tabir surya. Namun jika tidak, sebaiknya tuliskan tanggal pada produk saat membelinya.

Pakar kesehatan di Mayo Clinic mengingatkan orang-orang menjauhkan tabir surya dari sinar matahari langsung. Saat mereka berada di luar, sebaiknya simpan tabir surya di tempat teduh atau bungkus dengan handuk.

TABIR SURYA YANG AMAN

Tabir surya merupakan salah satu produk skincare yang wajib digunakan setiap hari. Sebab, tabir surya melindungi kulit dari bahaya sinar UV yang dapat menyebabkan berbagai permasalahan kulit seperti kulit kusam, penuaan dini, dan kanker kulit.

Seiring berkembangnya inovasi, konsumen semakin dimudahkan untuk memilih varian tabir surya dengan berbagai bentuk, mulai dari spray, stick, gel, hingga bedak yang bisa disesuaikan dengan kondisi kulit dan juga kebutuhan Anda. Simak tiga bentuk tabir surya yang bisa Anda pilih untuk melindungi kulit sehari-hari, dikutip dari siaran resmi Somethinc, Jumat.

Sunscreen Gel untuk kulit anti lengket

Untuk perlindungan wajah yang maksimal, disarankan menggunakan tabir surya dengan takaran 2 mililiter

atau dua ruas jari. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi yang memiliki kulit wajah berminyak karena dapat membuat wajah terasa lengket dan tebal. Namun, sekarang telah hadir tabir surya gel yang memberi rasa lebih nyaman. Selain itu, tabir surya gel memiliki kandungan berbasis dasar air, sehingga lebih mudah diserap oleh kulit wajah dan tidak membuat wajah berminyak.

Sunscreen powder sebagai pengganti bedak tabur

Malas dan sering lupa pakai tabir surya, padahal sudah memakai riasan. Inilah keunggulan tabir surya dalam bentuk bedak yang menjadi andalan para beauty enthusiast. Tabir surya bentuk bedak ini memberikan lapisan perlindungan sinar UV pada wajah sekaligus bekerja sebagai setting powder untuk mengunci riasan wajah. Kemudian, sunscreen powder juga dapat mengontrol minyak berlebih dan menyamarkan tampilan pori wajah.

Untuk memberikan tampilan wajah yang natural, Anda bisa menggunakan sunscreen powder dengan warna transparan yang cocok digunakan untuk seluruh warna kulit. Selain itu, Anda juga dapat merasakan kemudahan proses reapply tabir surya secara langsung di atas riasan wajah tanpa merusak make up, dengan aplikator puff lembut yang menyatu pada kemasan tabir surya.

Sunscreen Stick & Spray untuk kulit yang lebih sensitif

Dalam beberapa tahun terakhir, tabir surya dengan bentuk stick dan spray juga semakin populer dan diminati. Kedua bentuk tabir surya ini terasa ringan namun efektif untuk menangkal radiasi sinar UV sebelum memasuki lapisan kulit. Selain itu, tabir surya ini dapat menjadi pilihan bagi Anda yang memiliki kulit rentan terhadap jerawat karena tidak menyumbat pori wajah (Ant)



Menteri NasDem ... (dari hal 1)

PRESIDEN Jokowi merespons hubungannya dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang saat ini berada pada titik terendah. Bahkan pada 2 Mei lalu, Jokowi sengaja tak mengundang Surya saat bertemu para ketua umum partai koalisi di Istana Merdeka, Jakarta. "Saya biasa saja," kata Jokowi serata senyum, saat ditemui usai penanaman magrove serentak secara nasional di Taman Wisata Alam Mangrove Angke, Jakarta Utara, Senin (15/5/2023).

Tidak ada kalimat lain yang disampaikan Jokowi menjawab soal hubungannya dengan Surya ini. Bahkan, Jokowi memastikan belum ada rencana untuk bertemu Surya lagi dalam waktu dekat ini. Akan tetapi ketika ditanya apakah ada kemungkinan reshuffle akan menasarak menteri dari NasDem, Jokowi tidak membantahnya. "Ya bisa saja," kata kepala negara.

Sebelumnya, Surya mengakui hubungannya dengan Jokowi sedang berada di titik terendah. Partainya memang terang benderang menolak perpanjangan masa jabatan presiden yang didukung partai-partai koalisi. Puncaknya, ketika ia mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Saat ini, ada tiga menteri NasDem di pemerintahan Jokowi. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Isu reshuffle pun menguat, terutama setelah Jokowi bertemu seluruh pimpinan partai koalisi pendukung pemerintahan di Istana Merdeka pada Selasa (2/5/2023). Mulai dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Surya Paloh dan NasDem yang merupakan partai anggota koalisi pemerintah justru tidak diundang. Dua hari kemudian, Jokowi Jokowi mengakui sengaja tidak mengundang Surya. Alasannya karena NasDem sekarang sudah punya koalisi sendiri, yaitu Koalisi Perubahan bersama

Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. "Kita bicara apa adanya ya," kata Jokowi usai mengunjungi Mal Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2023).

Sementara, kata dia, enam partai yang hadir di Istana Negara Selasa kemarin juga ingin membangun kerja sama politik yang baik. "Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa, ya masa yang di sini (NasDem) tahu strateginya, dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa," kata Jokowi.

Jokowi pun menegaskan bahwa selain pejabat publik, dirinya juga merupakan pejabat politik. Sehingga, dia menilai hal yang wajar ketika dia berbicara soal politik. "Saya bicara berkaitan dengan itu bisa dong, kan itu tugasnya seorang presiden, hanya memang kalo sudah nanti ada ketetapan KPU baru saya ..., " kata Jokowi tidak melanjutkan pernyataannya.

Di sisi lain, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo membantah kabar adanya pembahasan isu reshuffle, saat dirinya dipanggil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bicara empat mata. Sebelumnya, Presiden Jokowi memanggil Hary Tanoe ke Istana Merdeka Jakarta, setelah yang bersangkutan mendampingi Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI). Ia mengaku ikut mendampingi Ketua Umum PSMTI Wilianto Tanta dan para pengusaha lainnya untuk berbicara mengenai dukungan PSMTI terhadap kepemimpinan Jokowi.

"Saya ada urusan lain tadi dengan Bapak Presiden, tadi sebentar (bicara empat mata) setelah acara PSMTI tadi," kata Hary Tanoe kepada wartawan, di Jakarta, Senin (15/5/2023).

Namun demikian Hary Tanoe menepis adanya agenda penyerahan nama menteri dari Partai Perindo kepada Kepala Negara RI. "Tidak betul (kabar itu), (saya) tidak menyerahkan apa-apa," ucapnya. "Saya hanya cukup membangun Partai Perindo karena membangun partai itu butuh konsentrasi, butuh fokus, jadi tugas saya membangun partai supaya bisa menjadi partai yang besar," kata dia lagi.

Lebih lanjut, dia menjelaskan peran PSMTI dalam menunjukkan sikap dan komitmen, untuk mendukung program pembangunan Presiden Jokowi. "Kalau sikap PSMTI mendukung apa yang sudah dilakukan beliau dan yang diharapkan ada kontinuitas, secara implisit memang

seperti itu, apa yang didukung beliau pasti didukung PSMTI," ucap Hary.

Survei Charta: 61% Pemilih Jokowi Dukung Ganjar

Di sisi lain, Survei Charta Politika Indonesia terkini menyatakan mayoritas pemilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pemilu 2019 mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024. Total ada 61 persen responden yang menyatakan dukungan kepada Ganjar. Kemudian, sebanyak 18 persen responden memberikan dukungannya kepada Prabowo Subianto dan 14 persen kepada Anies Baswedan.

Secara detil, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam keterangannya, Senin (15/5/2023) memaparkan para pemilih Jokowi - Ma'ruf pada Pilpres 2019 juga mayoritas atau 61 persen mendukung Ganjar dan 18 persen kepada Prabowo serta 14 persen kepada Anies. Sementara pemilih Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 mayoritas atau 53 persen mendukung Prabowo, 34 persen Anies, dan 8 persen Ganjar Pranowo.

Sementara, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo semakin jauh meninggalkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam survei terbaru yang digelar Charta Politika Indonesia. Dalam simulasi tiga nama di survei yang digelar pada 2-7 Mei 2023 itu, nama Ganjar memiliki elektabilitas 38,2 persen, Prabowo 31,1 persen, dan Anies 23,6 persen.

"Dari ketiga nama tersebut, terlihat adanya peningkatan elektabilitas pada nama Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sementara Anies Baswedan terlihat mengalami kecenderungan menurun sebagaimana terlihat pada tren yang disajikan," katanya.

Yunarto menjelaskan pada pengujian simulasi 3 nama, elektabilitas Ganjar Pranowo mengalami peningkatan setelah sebelumnya sempat mengalami penurunan pada periode April 2023 atau saat ramai isu Timnas Israel. Sedangkan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan relatif mengalami penurunan.

Menurut hasil survei, sebanyak 68 persen responden menilai Ganjar Pranowo sebagai tokoh yang paling mampu melanjutkan program-program Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sedangkan 20,4 persen

menjawab Prabowo Subianto dan hanya 8 persen menjawab Anies Baswedan.

Survei yang dilakukan Charta Politika Indonesia ini digelar dengan metode wawancara tatap muka di seluruh wilayah Indonesia. Metode sampling yang digunakan adalah multistage random sampling dengan jumlah sampel mencapai 1.220 Responden.

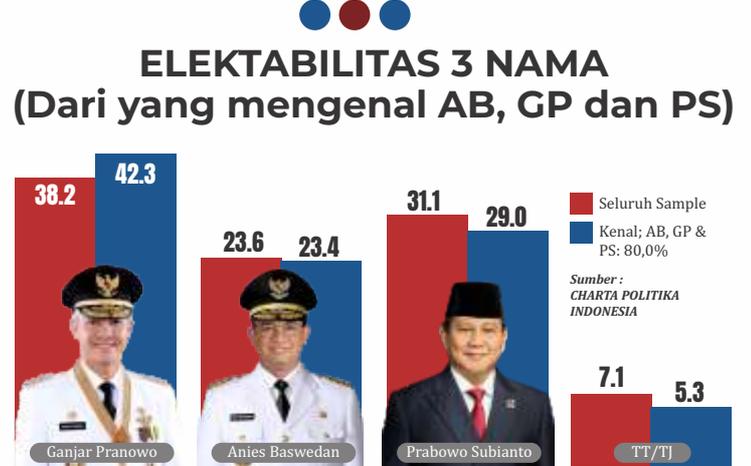
Kriteria responden dalam survei ini adalah masyarakat yang sudah berusia 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih. Quality control survei mencapai 20 peraenu dari total sampel dengan Margin of Error 2.82 persen.

Sementara itu, survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyatakan tren elektabilitas Ganjar Pranowo naik dalam sebulan terakhir. Sementara elektabilitas Prabowo Subianto meningkat tipis, sedangkan Anies Baswedan cenderung menurun. Survei ini dilakukan pada periode 30 April-7 Mei 2023. Dalam simulasi pilihan tertutup tiga nama, Ganjar mendapat dukungan terbanyak 39,2 persen. Kemudian, disusul Prabowo 32,1 persen dan Anies 19,7 persen.

Sementara, soal menteri yang berencananya nyapres Jokowi memberikan opsi cuti. Pernyataan Jokowi ini disampaikan di depan Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto saat penanaman pohon mangrove bersama TNI di Taman Wisata Alam Mangrove Jakarta Utara, Senin (15/5/2023) sore. "Kalau memang waktunya untuk kampanye kurang, ya lebih baik cuti," ungkap Jokowi.

Jokowi pun tak mempersoalkan jika ada menteri di Kabinet Indonesia Maju yang nyapres. Ia hanya berpesan agar menteri tersebut tidak melanggar aturan perundang-undangan. Bahkan, Jokowi sempat menyinggung nama Prabowo dan meminta wartawan menanyakan rencana nyapres Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. "Khusus yang ini tadi nanti tolong ditanya juga ke Pak Prabowo," kata Jokowi.

Diketahui, selain Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, terdapat nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang berniat maju sebagai capres di Pilpres 2024. (wid,rls,ist, kum/dya)



Berawal Flexing, KPK Tetapkan Kepala Bea Cukai Makassar Tersangka Gratifikasi



Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andhi Pramono resmi menjadi tersangka gratifikasi dan sudah dicegah ke luar negeri. (dok.ist)

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andhi Pramono sebagai tersangka gratifikasi. Andhi juga dicegah ke luar negeri. Diketahui Andhi Pramono awalnya diperiksa KPK karena laporan publik terkait hobinya flexing atau pamer kemewahan di media sosial namun tidak sesuai dengan harta yang dilaporkan di LHKPN.

"KPK juga melakukan pencegahan agar tidak berpergian ke luar negeri terhadap pihak yang terkait dengan proses penyidikan ini sejak 12 Mei 2023 untuk jangka waktu 6 bulan pertama," jelas Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri di kantornya, Senin (15/5/2023).

Diketahui, KPK melakukan penggeledahan di rumah milik Kepala Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono pada Jumat (12/5/2023). Hasilnya ditemukan sejumlah barang diduga alat bukti terkait kasus dugaan gratifikasi yang menjerat Andhi. Rumah Andhi yang digeledah penyidik berada di Perumahan Legenda Wisata Cibubur, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Di rumah tersebut, tim penyidik menemukan dan mengamankan bukti di antaranya berbagai dokumen dan alat elektronik," ujar Ali. "Analisis dan penyitaan segera dilakukan untuk mengaitkan dengan unsur dugaan penerimaan gratifikasi yang disangkakan," imbuhnya.

KPK berharap agar Andhi bisa kooperatif dalam melakukan pemeriksaan. Belum diketahui, pencegahan ke luar negeri cukup dilakukan selama enam bulan atau ke depannya perlu ditambah. "Nanti sesuai kebutuhan bila penyidikan perkara ini membutuhkan waktu lebih dalam rangka pencegahan agar tidak berpergian ke luar negeri tentu kami akan panjang kembali," paparnya.

Ali memastikan bahwa pihaknya sudah memiliki kecukupan bukti sehingga bisa ditetapkan sebagai

tersangka. "Kami ingin sampaikan bahwa benar saat ini KPK sudah meningkatkan proses dari LHKPN kemudian penyelidikan dan saat ini sudah meningkatkan pada proses penyidikan," ungkapnya. "Jadi sudah ada tersangkanya ya untuk dugaan penerimaan gratifikasi oleh pejabat di Ditjen Bea dan Cukai kemenkeu," tegas Ali.

Adapun Andhi menjadi sorotan karena disebut-sebut mengenakan barang mewah. Baca juga: Viral Video Rumah Mewah Kepala Bea Cukai Makassar, Ini Rincian Kekayaannya Anak Andhi, Atasya Yasmine juga kerap mengunggah foto-foto dengan pakaian bermerek dan gambaran kehidupan glamor lainnya. Pada salah satu unggahan, harga pakaiannya dari atas hingga bawah mencapai Rp 25 juta. Ia juga merupakan mahasiswa double degree di Universitas Indonesia (UI) dan Melbourne University, Australia. Warganet juga mengunggah video diduga Atasya sedang berjoget di kelab malam.

Andhi tercatat memiliki harta Rp 14,8 miliar. Dilihat dari situs KPK, Senin (15/5/2023), Andhi menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK pada 23 Februari 2023. LHKPN tersebut berisi kekayaan Andhi selama 2022.

Dalam LHKPN tersebut, Andhi tercatat memiliki 15 bidang tanah dan bangunan senilai Rp 7.129.724.000 (Rp 7,1 miliar). Tanah dan bangunannya itu tersebar di Salatiga, Batam, Jakarta, Banyuasin, Bogor, hingga Cianjur. Andhi melaporkan 13 bidang tanah dan bangunannya merupakan hasil sendiri. Sedangkan dua lainnya berasal dari hibah dengan akta.

Selanjutnya, Andhi memiliki 13 unit kendaraan dengan nilai total Rp 1.863.000.000 (Rp 1,8 miliar). Tujuh unit kendaraannya merupakan barang kuno atau antik, seperti Vespa Piaggio tahun 1962 dan sedan Austin tahun

1963.

Andhi juga melaporkan dirinya memiliki harta bergerak senilai Rp 711,5 juta, surat berharga Rp 4.225.791.644 (Rp 4,2 miliar) serta kas dan setara kas Rp 944.680.770 (Rp 944,6 juta). Andhi tak memiliki utang sehingga total hartanya Rp 14.874.696.414 (Rp 14,8 miliar).

Kemenkeu Belum Putus Statusnya

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan merespons Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono yang ditetapkan sebagai tersangka penerima gratifikasi oleh KPK. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC, Nirwala Dwi Heryanto mengatakan pihaknya baru menge-

tahui informasi penetapan Andhi Pramono (AP) dari media. "Informasi penetapan AP sebagai tersangka baru kami dapat dari media," kata Nirwala saat dihubungi Senin (15/5/2023).

Nirwala menyebut selanjutnya pihaknya akan mendalami informasi lebih lanjut ke KPK untuk menentukan status kepegawaian Andhi Pramono sebagai Kepala Bea Cukai Makassar. "Informasi ini akan kami dalam lebih lanjut dengan KPK untuk kemudian dapat memperoleh informasi yang utuh guna menentukan status kepegawaian yang bersangkutan berdasarkan ketentuan yang berlaku terhadap ASN," tuturnya.

Sebelumnya Andhi Pramono menjadi sorotan setelah aset kekayaannya dianggap tidak sesuai dengan profil. Dia diungkap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mempunyai transaksi mencurigakan yang saling salip-menyalip besarnya dengan mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, yang juga jadi tersangka.

Hal itu diungkap oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Dia awalnya menjelaskan temuan transaksi mencurigakan terkait Andhi Pramono telah diserahkan kepada KPK sejak awal 2022. "Sejak awal 2022 lalu, sudah setahun lalu (dilaporkan) karena ada indikasi itu makanya kami serahkan," kata Ivan saat dimintai konfirmasi, Kamis (9/3/2023).

Ivan kemudian mengungkap bentuk transaksi aneh yang diduga berkaitan dengan Andhi Pramono. Kepala Bea Cukai Makassar itu diduga menerima setoran dari perusahaan dengan jumlah besar dari riwayat transaksi yang ditemukan PPATK. "Banyak setoran tunai dari perusahaan-perusahaan," katanya. (wid,rls,dtc,ist/dya)

DAFTAR KEKAYAAN KEPALA KANTOR BEA CUKAI MAKASSAR

ANDHI PRAMONO

Sumber: LHKPN 16 Februari 2022 untuk periodik 2021,



TANAH DAN BANGUNAN
Rp. 98 MILIAR

○ Tercatat mempunyai sebanyak 15 aset tanah dan bangunan



KAS DAN SETARA KAS
RP. 1,21 MILIAR.



TRANSPORTASI DAN MESIN
RP 1,84 MILIAR

○ Mempunyai 13 alat transportasi dan mesin yakni 9 unit mobil dan 4 unit motor



HARTA BERGERAK LAIN
RP 706,5 JUTA



SURAT BERHARGA
RP 2,99 MILIAR



TOTAL KEKAYAAN
RP 13.753.365.726